

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai keuntungan yang ditargetkan. Melalui keuntungan yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Kebijakan dividen pada hakikatnya adalah menentukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan ditahan sebagai bagian dari laba ditahan. Levy dan Sarnat (1990) dalam Harjono (2002). Kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan publik sangat diperhatikan oleh para investor. Kebijakan tersebut dapat mengundang investor untuk membeli atau mempertahankan saham perusahaan atau sebaliknya mereka akan memutuskan untuk tidak membeli atau menjual saham perusahaan. Pertimbangannya adalah tingkat pengembalian atas dana yang mereka investasikan dalam bentuk saham berupa dividen ataupun dalam bentuk *capital gain* harus lebih menguntungkan dibandingkan dengan obligasi pemerintah, tingkat bunga deposito ataupun lebih tinggi dari tingkat inflasi.

Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan pertumbuhan yang direncanakan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan perusahaan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan nilai saham di masa depan yang akhirnya akan menguntungkan pemegang saham karena memperoleh *capital gain*. Pembiayaan pertumbuhan tersebut dapat menggunakan alternatif, menggunakan sumber dana internal yang berbiaya murah antara lain berupa laba ditahan atau sumber dana eksternal yang relatif lebih mahal seperti pinjaman kepada kreditur.

Seorang investor dalam menginvestasikan dananya di pasar modal bertujuan untuk memperoleh dividen atau untuk memperoleh *capital gain*. Dividen pada prinsipnya adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor sedangkan *capital gain* merupakan pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga beli. Dividen memiliki risiko lebih rendah daripada *capital gain*. Hal ini dikarenakan dividen diterima menurut dasar periode berjalan, sementara prospek realisasi keuntungan modal diperoleh di masa, artinya untuk memperoleh *capital gain* harus berani untuk berspekulasi bahwa harga saham yang akan datang lebih besar daripada harga saham pada waktu pembelian sehingga dividen lebih baik daripada *capital gain*. Atmaja (1994) dalam Nurdhiana (2010).

Fenomena kebijakan dividen di Indonesia yaitu adanya perusahaan yang membagikan dividen akan tetapi menuai kritik. PT HM Sampoerna Tbk membagikan dividen namun, langkah perusahaan rokok itu justru menuai kritik pedas dari Indonesia *for Global Justice* (IGJ). IGJ menilai, pembagian dividen

hanya menguntungkan PT Phillip Morris Indonesia, pemegang saham terbesar di HM Sampoerna Tbk. Peneliti IGJ, Salamudin Daeng melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 19 Mei 2014, menghitung jika dividen yang diterima Phillip Morris dari pabrik rokok terbesar di Indonesia itu tidak sebanding dengan investasi yang ditanamkan perusahaan rokok asal Negeri Barack Obama tersebut. Sejak bercokol di Indonesia pada tahun 2005, Phillip Morris hanya menginvestasikan uangnya di industri rokok nasional sebesar 400 juta dolar AS, kalau dirupiahkan rata-rata hanya Rp 550 miliar per tahun di kurs Rp 11 ribu.

Secara logika ekonomi, jika memang berkomitmen dalam pembangunan ekonomi Indonesia, perusahaan asing harus melakukan reinvestasi, sementara sekarang ini lalu lintas transfer keuntungan perusahaan asing sangat bebas. Phillip Morris saat ini mengempit saham HM Sampoerna 98.18 persen, dengan pembagian dividen tunai sebesar Rp 9,95 triliun atau Rp 2.269 per lembar saham dari laba bersih tahun buku 2012, sebagian besar mengalir ke kas Phillip Morris. Dari seluruh laba pada tahun 2012, 100 persen dibagikan kepada pemegang saham, tidak ada laba yang ditahan. Salamudin menjelaskan, dengan melakukan reinvestasi maka akan ada modal bergulir yang pada akhirnya juga mendorong ekonomi. Sementara saat ini, dengan rezim devisa bebas, perusahaan asing bisa seenaknya melakukan transfer setiap ada keuntungan, padahal jika tidak diatur, ujung-ujungnya dapat membuat *capital outflow* sehingga berujung pada defisit. Uang dari hasil keuntungan itu bersumber dari ekonomi Indonesia, sehingga tidak bisa lari semuanya, harus ada reinvestasi pada sektor yang menyerap tenaga kerja yang membangun industri.

Menurut Salamudin, harus dilacak keuntungan yang didapat dari ekonomi Indonesia itu dilarikan ke luar negeri digunakan untuk apa saja. Negara harus membuat regulasi bahwa perusahaan yang meraih untung besar harus melakukan reinvestasi karena jika tidak diatur bisa terjadi *capital outflow*. Hal lain yang harus diperhatikan bahwa perusahaan asing juga harus mempunyai komitmen memperbaiki upah buruh, harga pembelian tembakau ditingkatkan petani, dan menghentikan praktik alih daya. Hal ini normatif dan mendesak, sesuatu yang tidak diatur norma harus dijalankan oleh perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar. Ironisnya, ditengah pendapatan dividen yang sedemikian besar, Phillip Morris justru menutup dua pabriknya di Jember dan Lumajang yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) dan mem-PHK 4.900 buruh (Metrotvnews.com Senin, 19 Mei 2014).

Fenomena lain yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) pada tahun 2011 dengan skor 70,83% sebagai perusahaan terpercaya. Pada saat ini, santer beredar rumor di kalangan pasar modal mengenai PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yakni, pemerintah akan memberikan *bailout* alias dana talangan kepada PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang saat ini memiliki masalah segudang yang belum terselesaikan. Pertama, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memiliki utang yang cukup besar sehingga banyak pihak yang pesimistis akan kemampuan perusahaan batubara ini dalam menyelesaikan kewajibannya. Total pinjaman PT Bumi Resources Tbk (BUMI) per Juni 2012 adalah US\$ 3.789,63 juta. Kedua, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dituding

melakukan penyelewengan dana oleh Bumi Plc. Bumi Plc menegaskan akan melakukan investigasi yang berfokus pada dana pengembangan yang besar di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan aset di PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), yang semua dihapuskan nilainya menjadi nol dalam akun Bumi Plc per 31 Desember 2011, kecuali investasi US\$ 39 juta di laporan keuangan konsolidasi. Ketiga, setelah dituding melakukan penyelewengan dana oleh Bumi Plc, *outlook* peringkat utang PT Bumi Resources Tbk (BUMI) diturunkan oleh sejumlah perusahaan pemeringkat internasional. Mereka adalah *Moody's Investor Service* dan *Standard & Poor's*. Pemangkasan *outlook* peringkat utang tentunya akan berdampak pada upaya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) untuk mendapatkan akses ke pasar modal. Investor mempertanyakan kemampuan perusahaan batubara ini dalam mengembalikan pinjamannya. Banyaknya permasalahan yang kemudian memicu mencuatnya rumor *bailout* tersebut. Saat ini, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data RTI, nilai kapitalisasi PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencapai Rp 14,125 triliun dan menduduki posisi ke 55 di Bursa Efek Indonesia.

Kepala Riset Universal Broker Satrio Utomo menjelaskan, *bailout* merupakan usaha penyelamatan yang kalau tidak dilakukan dampaknya bisa sistematis atau sangat besar terhadap Negara. Namun, Satrio menilai, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tidak layak mendapatkan *bailout* dari pemerintah, sangat menyayangkan jika dana pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat digunakan untuk menyelamatkan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), sebab dinilai *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tergolong

jelek. Pembayaran utang anak usaha grup Bakrie ini sejak tahun 2008 kerap mengalami *rescheduling*. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh perseoran bukannya dipakai untuk melunasi utang malah diinvestasikan lagi dengan bunga yang lebih kecil dibandingkan utangnya (Investasi.kontan.co.id Jum'at, 19 Oktober 2012).

Selain itu, fenomena lain terjadi pada PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) pada tahun 2011 dengan skor 85,82% sebagai perusahaan sangat terpercaya. Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), mendesak Garuda Indonesia meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar akuntabilitas perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini lebih optimal. Menurut Ketua Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso, setelah mendapat penjelasan dari jajaran direksi PT Garuda Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pihaknya mendorong Garuda meningkatkan pelaksanaan SPI (Sistem Pengendalian Internal), sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan meningkat. Sehingga di masa datang tidak terjadi lagi temuan BPK, seperti dilansir situs (dpr.go.id, Rabu, 19 Februari 2014).

Sejumlah temuan kelemahan pengelolaan keuangan Garuda terungkap dalam rapat antara Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), auditor BPK yang juga dihadiri Dirut Garuda Emirsyah Satar di Denpasar Bali, diantaranya adanya kelebihan pembayaran tarif konsensi jasa *ground handling* PT Garuda Indonesia kepada PT Gapura Angkasa selama tahun 2008-2012.

Pengelolaan suku cadang milik PT Garuda oleh PT GMFAA yang tidak diserahkan dengan baik, sehingga mengakibatkan perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan, tak hanya di PT Garuda, dari telaah laporan hasil BPK semester 1 tahun 2013, ditemukan sejumlah kasus penyimpangan keuangan Negara di 14 perusahaan BUMN. Hal itu disebabkan sebagian besar perusahaan BUMN itu belum memiliki tata kelola (*Good Corporate Governance/ GCG*) yang baik.

Beberapa BUMN yang masuk dalam telaah Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) itu diantaranya PT PLN, PT KAI, Bulog, PT Garuda Indonesia, PT Pelayaran Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BTN, PT BNI, PT BRI, PT Biofarma, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Krakatau Steel, dan PT Perum Perumnas. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 ditemukan 21 Objek Pemeriksaan terkait BUMN. Hasil telaah Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait BUMN itu, ditemukan ada 510 kasus penyimpangan keuangan Negara, sebanyak 234 kasus di antaranya terkait kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan sebanyak 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dari total 510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian. Jumlah potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan di BUMN itu mencapai Rp 2,60 triliun. Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) juga menemukan penyimpangan akibat ketidakefektifan sebanyak 28 kasus yang nilainya mencapai Rp 44,7 triliun di beberapa BUMN. Tingginya nilai ketidakefektifan di BUMN itu mengindikasikan

pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran. Sehingga total potensi kehilangan uang negara itu mencapai Rp 47,3 triliun (www.gresnews.com Sabtu, 22 Februari 2014).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen seperti pada Lampiran 1, antara lain:

1. *Good Corporate Governance* (Swabawani, 2010).
2. *Growth* (Haryetti dan Ekayanti, 2012; Dewi dan Sedana, 2014; Swabawani, 2010).
3. Kepemilikan Saham Manajerial (Muid, 2013).
4. Laba Bersih (Nurdhiana, 2010).
5. *Leverage* (Prawira, dkk., 2014; Muid, 2013; Retno dan Priantinah, 2012).
6. Likuiditas (Prawira, dkk., 2014; Idawati dan Sudiarta, 2013; Dewi dan Sedana, 2014).
7. Profitabilitas (Prawira, dkk., 2014; Idawati dan Sudiarta, 2013; Haryetti dan Ekayanti, 2012; Muid, 2013; dan Swabawani, 2010; Nurdiana, 2012; Puspita dan Nugroho, 2011).
8. *Size* (Prawira, dkk., 2014; Muid, 2013; Retno dan Priantinah, 2012).
9. Struktur Modal (Dewi dan Sedana, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Indah Sulistiyowati, Ratna Angraini dan Tri Hesti Utaminingtyas (2010) dengan judul Profitabilitas, *Leverage*, dan *Growth* Terhadap Kebijakan Dividen dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Intervening. Variabel yang diteliti yaitu

kebijakan dividen sebagai variabel dependen, profitabilitas, *leverage*, *growth* sebagai variabel independen, dan *good corporate governance* sebagai variabel intervening. Usia perusahaan dan jenis industri sebagai Variabel kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia sedangkan data implementasi *good corporate governance* menggunakan hasil pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu (a) perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2006, 2007, dan 2008 berupa skor pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*), (b) perusahaan yang membagikan keuntungan berupa dividen kepada para pemegang saham pada tahun pemeringkatan CGPI, (c) perusahaan yang mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi ditandai dengan nilai pertumbuhan yang positif, (d) perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember dan dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah, dan (e) data perusahaan lengkap dengan variabel yang akan diteliti. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah sebanyak 37 perusahaan. Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel sebanyak 63 perusahaan terdiri dari pada tahun 2006 sebanyak 22 perusahaan, tahun 2007 sebanyak 21 perusahaan dan tahun 2008 sebanyak 20 perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulistiyowati, Ratna Anggraini dan Tri Hesti Utaminingtyas

(2010) yaitu profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen, *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen, *growth* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *good corporate governance*, *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *good corporate governance*, *growth* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *good corporate governance*, dan *good corporate governance* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen.

Adapun pengembangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilaksanakan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data implementasi *good corporate governance* hasil riset dan pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) tahun 2010-2013, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan data pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Adapun pengaruh perbedaan tahun terhadap variabel adalah karena pada saat memasuki tahun 2010, ekonomi dunia sedang mengalami dua kejadian penting, yaitu: pertama, krisis ekonomi kapitalisme global yang sangat mendalam dan struktural, dan kedua, pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari utara (Amerika Serikat dan Eropa) ke Asia Timur (Tiongkok) dan Amerika Latin (www.berdikarionline.com Jum'at, 24 Desember 2010). Pengembangan lain yang penulis lakukan yaitu indikator *leverage* menggunakan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio* (DTA) sedangkan peneliti terdahulu menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER). Alasan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio*

(DTA) sebagai indikator *leverage* karena *Debt to Total Assets Ratio* (DTA) mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang, semua hutang yang dimiliki perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang, kreditor itu lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik (Sutrisno, 2012:217).

Selain itu adapun keterbatasan dari peneliti terdahulu yaitu penelitian hanya menggunakan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI tahun 2006, 2007, dan 2008 sehingga diperiode jumlah sampel yang tidak banyak, hal ini dikarenakan masih sedikit perusahaan yang mau berpartisipasi dalam program yang dilakukan oleh IICG yang bersifat sukarela dan hasil penelitian mengindikasikan bahwa model penelitian yang perlu diperbaiki agar dapat lebih menjelaskan variabel yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, *leverage*, *growth*, *good corporate governance* dan kebijakan dividen. Variabel tersebut dipilih karena pada beberapa penelitian sebelumnya belum terdapat pengaruh secara konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *growth* terhadap kebijakan dividen dan *good corporate governance* dengan mengambil judul: **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Growth* Terhadap Kebijakan Dividen dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan *Corporate Governance Perception Index* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana *growth* pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana *good corporate governance* pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana kebijakan dividen pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *growth* terhadap *good corporate governance* baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, *growth*, dan *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *growth* terhadap kebijakan dividen dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui *growth* pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui *good corporate governance* pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui kebijakan dividen pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *growth* terhadap *good corporate governance* baik secara parsial maupun

simultan pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

7. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, *growth*, dan *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
8. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *growth* terhadap kebijakan dividen dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan laba yang diperoleh dengan cara meningkatkan penjualan untuk meningkatkan kepercayaan investor.
 - b. Perusahaan dapat mengetahui seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh hutang untuk membuat keputusan pendanaan.

- c. Perusahaan dapat mengetahui kemampuan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik saham.
- d. Dengan diterapkannya tata kelola yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman.

2. Bagi Peneliti Lain

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *growth* terhadap kebijakan dividen dan *good corporate governance*.
- b. Sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- b. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain.
- c. Dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Bursa Efek Indonesia Jl. Veteran No. 10 Bandung dan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Januari 2015 , sumber data dari *Indonesian Stock Exchange* (www.idx.co.id) dan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (www.iicg.org).